

PANCASILA PERSPEKTIF MOHAMMAD HATTA SEBAGAI DASAR PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA

Ahmad Syauqi Fuady
STIT Muhammadiyah Bojonegoro
syauqi.asf68@gmail.com

Abstract: This article aims to find out how Mohammad Hatta's interpretation of Pancasila is. And how these values become the basis of the implementation of Islamic education in Indonesia. Mohammad Hatta was a Muslim nationalist who was involved in the birth of Pancasila. The Islamic style of Mohammad Hatta is oriented towards substance rather than formality and symbols such as salt rather than lipstick. As a devout Muslim and nationalist, his interpretation of Pancasila was accepted by different political groups. Pancasila, according to Hatta, contains two main fundamentals, namely the moral fundamentals of religious ethics (1st principle) and political fundamentals (2nd to 5th precepts). The Precepts of Godhead become the basis for leading the other precepts. The existence of the One Precepts of Godhead as the first precepts causes the five precepts to bind to each other and creates a harmonious pair between the five precepts in Pancasila. Pancasila for Mohammad Hatta is a guideline for realizing happiness, prosperity, peace and independence in a perfectly sovereign Indonesian society and legal state. The practice of implementing Islamic Education in Indonesia should make these four things as things that need to be realized. The basic values of the Pancasila perspective of Mohammad Hatta to be used as the basis for the implementation of Islamic education in Indonesia: Divine values, human values, unity values, social values, and justice values.

Keywords: Pancasila, Mohammad Hatta, Principal, Islamic Education.

PENDAHULUAN

Merujuk kepada pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945, Pancasila merupakan falsafah negara (*Philosophische Grondslag*) yang dimaksudkan untuk menjadi dasar negara. Pancasila juga dimaksudkan sebagai pandangan hidup (*Weltanschauung*) bangsa Indonesia untuk dijadikan sebagai ideologi negara.¹ Dengan tanpa kehadiran Pancasila, sebagai falsafah dan ideologi bangsa, sebagai hasil dari konsensus dan kesepakatan bersama, maka arah dan jalannya kehidupan bangsa akan terganggu dan menghadapi masalah.²

Pancasila haruslah dipandang sebagai norma dasar bernegara (*Grundnorm/Staatsfundamentalnorm*) yang menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.³ Pancasila menjadi napas dari segala peraturan dan kebijakan yang dibuat pemerintah. Nilai-nilai Pancasila hendaknya menjelma secara aktual dalam kehidupan

¹ Yudi Latif, *Revolusi Pancasila* (Jakarta: Penerbit Mizan, 2015), 31.

² Anwar Abbas, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam* (Jakarta: LP3M STIE Ahmad Dahlan, 2008), 151-152.

³ Yudi Latif, *Revolusi*, 52.



berbangsa dan bernegara. Dengan demikian Pancasila hendaknya tidak berhenti sekadar kerangka normatif, namun harus menjadi interpretatif realitas dalam bentuk pengetahuan dan ilmu, dan ujungnya menjadi kerangka operatif untuk rujukan dan pedoman operasional segala peraturan dan kebijakan.

Pancasila merupakan hasil konsensus atau kesepakatan bersama (*gentlemen's agreement*) antara kelompok kebangsaan dan agama.⁴ Kelompok kebangsaan menolak keinginan kelompok agama yang berkeinginan menjadikan agama Islam sebagai dasar negara. Mohammad Hatta merupakan salah satu tokoh yang terlibat dalam perumusan Pancasila yang ditempatkan dalam “kelompok nasionalis” atau kebangsaan.⁵ Mohammad Hatta dimasukkan Endang Saifuddin Anshari, ke dalam kelompok Nasionalis muslim “sekular” yang menghendaki pemisahan agama dan negara, antitesis kelompok “nasionalis islami” yang menghendaki Islam sebagai dasar negara.⁶

Selain sebagai seorang yang terlibat dalam penyusunan Pancasila, pembahasan tentang tafsir Pancasila berdasarkan perspektif Mohammad Hatta menarik. *Pertama*, meskipun Mohammad Hatta dianggap sebagai biang keladi penghapusan tujuh kata tentang syariat Islam dalam Piagam Jakarta⁷, namun tafsir Mohammad Hatta tentang Sila Pertama tampak terasa berakar dari nilai-nilai ajaran Tauhid⁸ dan Islam sehingga dapat diterima oleh umat Islam Indonesia, lebih masuk akal dan dapat dibenarkan sejarah daripada tafsiran-tafsiran yang diberikan oleh seorang sekularis, agnostik, dan apalagi komunis.⁹

Kedua, pribadi Mohammad Hatta. Mohammad Hatta dikenal khalayak sebagai seorang Pancasilais sejati dalam teori dan praktik, dimana keseluruhan pandangan dan tingkah laku dalam kehidupan pribadi, kenegaraan, dan pemerintahan senantiasa senapas dengan nilai-nilai luhur Pancasila.¹⁰ Mohammad Hatta juga sebagai “nagarawan moralis yang paling dihormati di Indonesia” yang pengaruh dan integritas pribadinya diakui oleh semua kelompok dan kalangan di Indonesia.¹¹ *Ketiga*, tafsiran Hatta terhadap Pancasila tidak mendapat tentangan dan keberatan dari kelompok-kelompok aliran politik di Indonesia. Hal ini disebabkan bahwa, di satu sisi, kalangan Islam menilai Hatta sebagai seorang pribadi yang tidak pernah terpisah jauh dari ajaran agamanya, sementara di sisi lain, kaum nasionalis sekular dapat menerima pandangan Hatta karena dia tidak membawa agama Islam ke dalam kehidupan bernegara secara langsung dan formal.¹²

Mohammad Hatta lahir dan tumbuh dari keluarga agamis, kakek dari ayahnya adalah seorang tokoh sarekat yang terkenal. Nilai-nilai agama menjadi napas dan menjelma nyata dalam kehidupan dan pribadi Manusia Hatta sebagai seorang muslim.

⁴ Yudi Latif, *Negara Paripurna* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Cetakan Keenam, Agustus 2017), 24.

⁵ Bahtiar Effendi, *Islam dan Negara, Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, Cetakan I, 1998), 85.

⁶ Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 Sebuah Konsensus Nasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 42.

⁷ Deliar Noer, *Mohammad Hatta Hati Nurani Bangsa* (Jakarta: Kompas, 2012), 89.

⁸ Noer, *Hati Nurani Bangsa*, 91.

⁹ Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Masalah Kenegaraan* (Jakarta: LP3ES, 1985), 154-156.

¹⁰ Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan* (Bandung: Mizan, edisi kedua cetakan pertama, 2015), 291.

¹¹ Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, 153.

¹² Anwar Abbas, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*, 160.



Sementara dalam kehidupan kenegaraan yang majemuk, Mohammad Hatta lebih menonjolkan agama sebagai substansi nilai dibandingkan dengan bentuk formalitas dan simbol. Corak keislaman Mohammad Hatta bagaikan garam yang tidak terlihat namun memberi rasa asin, bukan layaknya gincu yang tampak mencolok namun hambar rasanya.¹³

Nilai-nilai Islam dan aspirasi politik kebangsaan menjadi dua sisi dari satu sosok bernama Mohammad Hatta. Menjadi seorang Muslim bukan penghalang menjadi seorang nasionalis. Nilai-nilai sebagai seorang Muslim dapat menjadi sumber nilai pelaksanaan cita-cita kehidupan bernegara dan berbangsa. Oleh karena itu artikel ini hendak menggali bagaimana perspektif Mohammad Hatta sebagai seorang nasionalis muslim terhadap Pancasila. Nilai-nilai apa saja yang dapat digali dari Pancasila menurut perspektif Mohammad Hatta. Serta bagaimana nilai-nilai tersebut menjadi dasar dari pelaksanaan pendidikan Islam di Indonesia.

PEMBAHASAN

Pancasila menurut Mohammad Hatta

Pancasila, menurut Hatta, memuat dua fundamen pokok, yakni fundamen moral etika agama (sila ke-1) dan fundamen politik (sila ke-2 sampai sila ke-5). Dengan diletakkannya sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama, negara dan pemerintah memperoleh dasar moral yang kuat dan kokoh, yang didalamnya terdapat ajaran untuk berbuat benar, menegakkan keadilan, kebaikan, bersikap jujur serta menciptakan persaudaraan dan tolong-menolong. Jalannya politik pemerintahan mendapat dasar moral yang kuat. Berdasar modal nilai-nilai moral inilah, maka cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat dapat tercapai. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi dasar yang memimpin sila-sila yang lain. Keberadaan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama menyebabkan kelima sila saling ikat-mengikat dan menimbulkan pasangan yang harmonis antara kelima sila dalam Pancasila.¹⁴

Urutan antara sila pertama dengan sila kedua tidak dapat dipisahkan dan harus selalu berurutan. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab merupakan kelanjutan dengan perbuatan dalam praktik hidup daripada dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Ajaran-ajaran tentang kebaikan, keadilan, kejujuran, persaudaraan, dan tolong-menolong sebagaimana yang diajarkan oleh prinsip-prinsip ketuhanan menjadi modal dasar dalam menjalankan prinsip kemanusiaan. Prinsip kemanusiaan akan tegak dengan menerapkan nilai-nilai dasar tersebut. Seperti juga dengan dasar Ketuhanan yang Maha Esa yang sifatnya universal, maka sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab juga berlaku universal yang tidak terikat kepada batas negara dan corak bangsa. Kemanusiaan berlaku secara universal.

Wujud pelaksanaan dari prinsip Kemanusiaan ini, Hatta menekankan tentang perlunya negara menjamin dan melindungi hak-hak dan kewajiban-kewajiban asasi

¹³ Ihsan Ali-Fauzi, "The Politic of Salt, not the Politics of Lipstick: Mohammad Hatta on Islam and Nationalism", dalam *Jurnal Studia Islamika*, Vol. 9 No. 2, 2002, 89-90.

¹⁴ Mohammad Hatta, *Pengertian Pancasila* (Jakarta: Idayu Press, 1977), 12-30.



warga negara. Indonesia merdeka sebagai negara hukum harus melindungi hak hidup, hak, keselamatan badan, dan hak kebebasan yang merupakan karunia Tuhan yang Maha Esa.

Dasar kemanusiaan yang berakar pada prinsip ketuhanan kemudian tercermin dalam sila-sila setelahnya. Sila Persatuan Indonesia menghendaki Indonesia yang satu dan tidak terpecah-pecah. Persatuan adalah syarat hidup bagi Indonesia. Perasaan persatuan Indonesia dipupuk oleh perasaan senasib dan sertujuan. Sila Persatuan Indonesia bukanlah berarti menutup diri dari dunia internasional, melainkan haruslah mengandung di dalamnya cita-cita persahabatan, persaudaraan segala bangsa yang diliputi oleh suasana kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran, kesucian, dan keindahan.

Sila Kerakyatan bukanlah prinsip yang menghendaki dan mencari suara terbanyak saja, melainkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan menghendaki adanya perilaku yang mengedepankan gotong-royong, musyawarah mufakat, dan kekeluargaan. Prinsip kerakyatan yang didasari oleh ketuhanan dan kemanusiaan akan mampu menghilangkan korupsi dan anarki, yang dapat mengancam, merusak, dan merubuhkan tatanan demokrasi seperti yang pernah terjadi dalam catatan sejarah lampau.

Sila Kelima tidak hanya sebagai dasar negara melainkan juga sebagai tujuan negara. Keadilan sosial adalah langkah untuk menuju Indonesia yang adil dan makmur. Jika keempat sila ini dapat dijalankan dengan baik, maka sila keadilan sosial sebagai tujuan dari negara Republik Indonesia akan dapat tercapai.¹⁵

Tujuan Pancasila menurut Mohammad Hatta

Pancasila, menurut Hatta dalam pidatonya *Ilmu dan Kedudukan Sarjana Ekonomi dalam Masyarakat*, “mengikat seluruh lapisan masyarakat, terutama mengikat pemerintah serta alat-alat negara yang bertugas sebagai pelaksana haluan negara.”¹⁶ Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara haruslah dijadikan pedoman dan penuntun arah dalam pelaksanaan pemerintahan dalam berbagai bidang “untuk mewujudkan kebahagiaan, kesejahteraan, perdamaian, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia Merdeka berdaulat sempurna.”¹⁷

Pertama, kebahagiaan. Kebahagiaan bagi Mohammad Hatta akan terwujud jika seseorang telah berhasil memenuhi keperluan dan kebutuhan hidupnya. Keperluan hidupnya yang terpenting dapat dipuaskan. *Kedua*, kesejahteraan. Kesejahteraan setingkat lebih tinggi daripada kebahagiaan. Orang merasa hidupnya sejahtera apabila ia merasa senang tidak kurang suatu apa dalam batas yang mungkin dicapainya. Jiwanya tenteram, lahir dan batin terpelihara. Ia merasakan keadilan dalam hidupnya, tidak ada yang patut menimbulkan iri-hatinya dan tidak ada gangguan dari sekitarnya. *Ketiga*, perdamaian. Bagi Hatta perdamaian baru akan tercapai apabila orang benar-benar merasa hidup dalam suasana damai, keluar dan ke dalam. Perdamaian tidak bisa

¹⁵ Hatta, *Pengertian Pancasila*, 12-34.

¹⁶ Mohammad Hatta, “Ilmu dan Kedudukan Sarjana Ekonomi dalam Masyarakat”, dalam I. Wangsa Widjaja dan Meutia F. Swasono, *Kumpulan Pidato II dari Tahun 1951 s.d 1979* (Jakarta: Inti Idayu Press, 1983), 185.

¹⁷ Mohammad Hatta, *Ekonomi Terpimpin* (Jakarta: Penerbit Fasco, 1960), 40-44.



dilepaskan Suasana damai ini bisa timbul apabila orang merasakan hidup bahagia dan sejahtera. *Keempat*, kemerdekaan. Menurut Hatta kemerdekaan tidaklah hanya berkaitan dengan masalah penjajahan, melainkan kemerdekaan tiap-tiap orang dari segala penindasan. Kemerdekaan adalah terlindunginya hak-hak asasi manusia dari segala bentuk pelanggaran dan penindasan orang lain.

Nilai-nilai Pancasila Mohammad Hatta sebagai Dasar Pendidikan Islam di Indonesia

Uraian berikut ini menjelaskan lima nilai Pancasila menurut Mohammad Hatta:

a. Nilai Dasar Ketuhanan.

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menurut pendapat Hatta menggambarkan prinsip tauhid, yang hanya dijumpai dalam ajaran Islam. Percaya kepada Tuhan bagi Hatta memiliki dua arti yang saling berkaitan dan tidak bisa dilepaskan. *Pertama*, percaya kepada Tuhan memiliki konsekuensi bagi kepercayaan dan beriman kepada Tuhan secara mutlak. *Kedua*, wujud dari iman dan percaya tersebut adalah kepedulian terhadap sesama manusia. Iman dan percaya kepada Tuhan haruslah diikuti dan ditindaklanjuti dengan amal saleh dan perbuatan nyata dalam kehidupan.¹⁸

Kepercayaan kepada Tuhan akan melahirkan perasaan agama yang luhur dalam setiap pribadi manusia Indonesia. “Perasaan keagamaan”, urai Hatta, “membawa manusia ke alam yang suci, menciptakan segala yang suci di dunia dan akhirat.”¹⁹ Ajaran-ajaran suci agama yang berisi kebajikan, kebaikan, kebenaran, keadilan, persaudaraan, perdamaian, adalah nilai-nilai pokok yang harus ditanamkan ke setiap dada masyarakat Indonesia.

Pendidikan Islam sudah seharusnya menempatkan nilai ketuhanan dan keislaman sebagai pokok utama. Mendidik anak untuk memiliki keimanan, pengamalan keislaman, dan meneguhi kebenaran adalah prinsip dasar pendidikan Islam.

b. Nilai Dasar Kemanusiaan

Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab merupakan kelanjutan dengan perbuatan dalam praktik hidup daripada dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai dasar kemanusiaan, dalam kerangka berpikir Hatta, adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari nilai ketuhanan. Keduanya adalah erat hubungannya sebagai sebuah landasan moral bangsa. Dasar ketuhanan mengajarkan tentang kesatuan hidup manusia serta membimbing manusia untuk meraih hidup yang suci, sedangkan dasar kemanusiaan menghendaki praktik dalam kehidupan yang menghargai manusia.²⁰ Dasar ketuhanan memberi sinaran terang bagi kemanusiaan, sebaliknya, dasar kemanusiaan memperoleh fondasi kukuh dari nilai-nilai ketuhanan.

¹⁸ Deliar Noer, “Antara Ide Agama dan Kebangsaan”, dalam Seri Buku Tempo Bapak Bangsa, *Hatta Jejak yang Melampaui Zaman* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2010), 141.

¹⁹ Mohammad Hatta, “Sambutan Hari Natal 1947”, dalam *Kumpulan Karangan IV* (Jakarta: Penerbitan dan Balai Buku Indonesia, 1954), 157.

²⁰ Mohammad Hatta, “Amanat Kepada Konferensi Golongan Tionghoa”, dalam *Kumpulan Karangan IV* (Jakarta: Penerbitan dan Balai Buku Indonesia, 1954), 159.



Nilai-nilai kemanusiaan yang dijalankan secara penuh konsisten dan seiring sejalan dengan nilai ketuhanan akan mampu mengantarkan pendidikan sebagai upaya menuju cita-cita ideal yang diinginkan Hatta: manusia beradab. Manusia yang beradab akan dapat menjalin hubungan yang baik dan harmonis terhadap Tuhan, dirinya sendiri, sesama manusia, makhluk hidup lain, dan seluruh lingkungan hidup di alam semesta ini.

Pendidikan Islam menganut paralelisme antara hubungan vertikal dengan Tuhan (*hablun minallah*) dan hubungan horizontal dengan antarmanusia (*hablun minanaas*). Iman dan amal salih sepaket dan tidak dipisahkan. Wujud keimanan dan keislaman adalah berbuat baik terhadap sesama manusia. Perbuatan baik terhadap manusia tidak dibatasi oleh batas-batas agama, bangsa, negara, suku. Kemanusiaan hendaknya bersifat universal untuk seluruh umat manusia.

Selain itu, nilai kemanusiaan ini diwujudkan dalam bentuk penghargaan yang setinggi-tingginya terhadap hak asasi manusia. Manusia lahir dengan potensi lahiriah yang harus dijaga, dipelihara, dan dikembangkan.

c. Nilai Dasar Persatuan

Persatuan Indonesia mensyaratkan adanya kesadaran terhadap kemajemukan yang dimiliki Indonesia. Perbedaan suku, budaya, ras, agama, warna kulit, dan lain sebagainya bukanlah jurang pemisah yang mengancam persatuan. Kemajemukan dan multikultur adalah napas Indonesia yang tidak bisa disangkal dan harus senantiasa dijaga dan dirawat dari generasi ke generasi. Sikap yang merasa lebih unggul dibanding kelompok lain dapat mengancam persatuan Indonesia.

Sila Persatuan Indonesia mensyaratkan dipupuknya persahabatan, persaudaraan yang diliputi oleh suasana kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran, kesucian, dan keindahan. Nilai-nilai ini harus senantiasa dipegang dalam pergaulan dengan sesama anak bangsa maupun dengan bangsa-bangsa yang lain. Tentu saja, persatuan Indonesia harus senantiasa dipertahankan meski menghadapi tantangan dan ancaman dari musuh.

Kemajemukan dan perbedaan menurut pendidikan Islam adalah *sunnatullah* yang tidak bisa ditolak. Sementara menjaga persatuan merupakan kebajikan yang harus diutamakan dalam menghadapi kemajemukan dan perbedaan. Berpecah belah menjadi perihal yang tidak disukai dalam agama Islam. Pendidikan Islam hendaknya mengupayakan untuk mendidik dan menanamkan kesadaran kepada anak didiknya tentang kemajemukan dan persatuan ini. Mencintai negara adalah juga nilai-nilai yang harus diajarkan.

d. Nilai Dasar Kerakyatan

Mohammad Hatta menginginkan bangunan struktur sosial masyarakat yang ideal adalah masyarakat berdasar kolektivisme. Nilai-nilai gotong-royong, tolong-menolong, musyawarah mufakat, dan kekeluargaan haruslah menjadi fondasi kehidupan masyarakat. Jembatan untuk mewujudkan itu adalah dibangunnya sistem demokrasi kerakyatan yang bersendikan hikmat kebijaksanaan, musyawarah mufakat, dan perwakilan.

Masyarakat yang berdiri atas prinsip-prinsip kekeluargaan, kebersamaan, persaudaraan, gotong-royong, dan saling tolong-menolong adalah masyarakat yang



harus senantiasa dijaga dan diwujudkan. Dalam prinsip kerakyatan dan kolektivisme ini, setiap individu harus memiliki kesadaran bahwa dirinya merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari masyarakat.

Kesadaran manusia sebagai bagian dari masyarakat berarti bahwa manusia tidak boleh bersifat egois dengan selalu mengarahkan orientasi usahanya untuk kepentingan diri sendiri dengan mengorbankan kepentingan bersama dalam masyarakat. Oleh sebab itu, manusia harus benar-benar memperhatikan hak dan kewajibannya sebagai bagian dari anggota masyarakat. Manusia yang selalu menuntut haknya, tetapi abai dari kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat bukanlah ciri manusia yang diinginkan Hatta. Manusia yang terdidik dalam ideal Hatta haruslah tertanam dalam benaknya keyakinan dan kewajiban untuk mengusahakan terwujudnya kemajuan dari masyarakatnya.²¹

Prinsip tolong-menolong, musyawarah, dan mewujudkan kehidupan bersama yang aman damai adalah nilai-nilai utama dalam pendidikan Islam. Pendidikan Islam selain mendidik individu mengembangkan potensinya juga harus menanamkan kesadaran peserta didik sebagai bagian dari masyarakat. Penyadaran tentang hak dan kewajiban dalam kehidupan bersama penting dilakukan.

e. Nilai Dasar Keadilan

Keadilan sosial adalah cita-cita dan tujuan negara yang ingin diwujudkan Indonesia merdeka. Adil menurut Hatta adalah kondisi di mana “tiap-tiap orang dalam masyarakat merasakan keadilan diperlakukan serupa oleh negara dalam segala rupa dan bebas dari tindakan kezaliman.”²² Keadilan adalah kondisi yang tercipta akibat perbuatan adil. Keadilan dekat maknanya dengan persamaan. Keadilan dapat terwujud jika tiap orang diperlakukan oleh negara dengan sama tanpa dibeda-bedakan dalam berbagai bidang kehidupan. Tiap orang bersamaan hak dan kewajibannya dalam tiap bidang kehidupan.

Nilai dasar keadilan, menurut Hatta, selain berkaitan dengan perlakuan yang sama dan tidak dibeda-bedakan oleh negara, juga berkaitan erat dengan kedaulatan rakyat. “Pokok dari keadilan dalam negara dan masyarakat adalah kedaulatan rakyat.”²³ “Kedaulatan rakyat adalah memberi kekuasaan yang tertinggi kepada rakyat, tetapi juga meletakkan tanggung jawab yang terbesar.”²⁴ Rakyat lah yang memperoleh kekuasaan dan juga sekaligus tanggung jawab untuk melaksanakan kekuasaan itu.

Keadilan adalah bagian penting dalam pendidikan Islam. Perbuatan adil dekat dengan takwa. Oleh sebab itu nilai dasar keadilan hendaknya dapat diimplementasikan dalam manajemen di lembaga pendidikan, keadilan dalam memperlakukan siswa, dan keadilan dalam menentukan target-target belajar.

²¹ Mohammad Hatta, “Perguruan Dagang”, dalam *Kumpulan Karangan IV* (Jakarta: Penerbitan dan Balai Buku Indonesia, 1954), 97.

²² Mohammad Hatta, *Demokrasi Kita, Bebas Aktif, Ekonomi Masa Depan* (Jakarta: UI Press, cetakan ketiga 1997), 179.

²³ Hatta, *Demokrasi Kita, Bebas Aktif, Ekonomi Masa Depan*, 179.

²⁴ Mohammad Hatta, “Kedaulatan Rakyat”, dalam *Kumpulan Karangan IV* (Jakarta: Penerbitan dan Balai Buku Indonesia, 1954), 213.



Tidak boleh ada diskriminasi akses terhadap pendidikan, baik secara kualitas maupun kuantitas.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang penulis jelaskan di atas, ada beberapa kesimpulan yang dapat diperoleh, bahwa Pancasila, menurut Hatta, memuat dua fundamen pokok, yakni fundamen moral etika agama (sila ke-1) dan fundamen politik (sila ke-2 sampai sila ke-5). Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi dasar yang memimpin sila-sila yang lain. Keberadaan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama menyebabkan kelima sila saling ikat-mengikat dan menimbulkan pasangan yang harmonis antara kelima sila dalam Pancasila.

Pancasila bagi Mohammad Hatta adalah pegangan untuk mewujudkan kebahagiaan, kesejahteraan, perdamaian, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia Merdeka berdaulat sempurna. Praktik pelaksanaan Pendidikan Islam di Indonesia hendaknya menjadikan keempat hal tersebut sebagai hal yang perlu diwujudkan. Nilai-nilai dasar Pancasila perspektif Mohammad Hatta untuk dijadikan sebagai dasar pelaksanaan pendidikan Islam di Indonesia: Nilai ketuhanan berorientasi iman dan amal; nilai kemanusiaan yang menjunjung hak-hak manusia; nilai persatuan yang menghargai perbedaan; nilai kerakyatan yang berorientasi kerjasama, tolong-menolong, dan mufakat; dan nilai keadilan untuk mewujudkan persamaan dan kedaulatan rakyat. □

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Anwar. 2008. *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*. Jakarta: LP3M STIE Ahmad Dahlan.
- Ali-Fauzi, Ihsan. 2002. "The Politic of Salt, not the Politics of Lipstick: Mohammad Hatta on Islam and Nationalism", dalam *Jurnal Studia Islamika*, Vol. 9 No. 2, 2002.
- Anshari, Endang Saifuddin. 1997. *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 Sebuah Konsensus Nasional*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Effendi, Bahtiar. 1998. *Islam dan Negara, Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina, Cetakan I.
- Hatta, Mohammad. 1954. "Amanat Kepada Konferensi Golongan Tionghoa", dalam *Kumpulan Karangan IV*. Jakarta: Penerbitan dan Balai Buku Indonesia.
- _____. 1997. *Demokrasi Kita, Bebas Aktif, Ekonomi Masa Depan*. Jakarta: UI Press, cetakan ketiga.
- _____. 1983. "Ilmu dan Kedudukan Sarjana Ekonomi dalam Masyarakat", dalam I. Widjaja, Wangsa dan Meutia F. Swasono. *Kumpulan Pidato II dari Tahun 1951 s.d 1979*. Jakarta: Inti Idayu Press.
- _____. 1960. *Ekonomi Terpimpin*. Jakarta: Penerbit Fasco.
- _____. 1954. "Kedaulatan Rakyat", dalam *Kumpulan Karangan IV*. Jakarta: Penerbitan dan Balai Buku Indonesia.
- _____. 1977. *Pengertian Pancasila*. Jakarta: Idayu Press.
- _____. 1954. "Sambutan Hari Natal 1947", dalam *Kumpulan Karangan IV*. Jakarta: Penerbitan dan Balai Buku Indonesia.



- _____.1954. “Perguruan Dagang”, dalam *Kumpulan Karangan IV*. Jakarta: Penerbitan dan Balai Buku Indonesia.
- Latif, Yudi. 2017. *Negara Paripurna*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Cetakan Keenam, Agustus.
- _____.2015. *Revolusi Pancasila*. Jakarta: Penerbit Mizan.
- Ma’arif, Ahmad Syafi’i. 2015. *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan*. Bandung: Mizan, edisi kedua cetakan pertama.
- _____.1985. *Islam dan Masalah Kenegaraan*. Jakarta: LP3ES.
- Noer, Deliar. 2010. “Antara Ide Agama dan Kebangsaan”, dalam Seri Buku Tempo Bapak Bangsa, *Hatta Jejak yang Melampaui Zaman*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- _____.2012. *Mohammad Hatta Hati Nurani Bangsa*. Jakarta: Kompas.

